

Analisis Akuntabilitas Lembaga Pendidikan Kontemporer

Arif Fiandi

Madrasah Tsanawiyah Negeri 11 Agam

E-mail: ariffiandi03@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to discuss and find out about the concept of accountability in contemporary educational institutions. This research method uses literature review, by studying from literary sources that are relevant to the material discussed. Accountability is the obligation to provide accountability for a mandate or responsibility assigned to related parties, especially the party providing the mandate. The application of accountability in educational institutions is a must to increase public trust in educational institutions. Forms of implementing accountability in contemporary educational institutions include: Decisions must be made in writing and available to every citizen who needs them, accuracy and completeness of information, explanation of policy objectives taken and communicated, feasibility and consistency, and dissemination of information regarding a decision. One of the accountability models applied in contemporary educational institutions is administrative accountability, which includes traditional accountability, managerial accountability, program accountability and process accountability.*

Keywords: *Accountability, educational institutions, contemporary education*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan mengetahui tentang konsep akuntabilitas lembaga pendidikan kontemporer. Metode penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan, dengan mengkaji dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan materi yang dibahas. Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggung jawaban tentang suatu amanah atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak-pihak terkait, terutama pihak yang memberikan amanah. Penerapan akuntabilitas dalam lembaga pendidikan menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada lembaga pendidikan. Bentuk penerapan akuntabilitas dalam lembaga pendidikan kontemporer antara lain : Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, akurasi dan kelengkapan informasi, penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, kelayakan dan konsistensi, serta penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. Salah satu model akuntabilitas yang diterapkan dalam lembaga pendidikan kontemporer adalah akuntabilitas administratif, yang meliputi akuntabilitas tradisional, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program dan akuntabilitas proses.

Kata kunci: Akuntabilitas, lembaga pendidikan, pendidikan kontemporer

PENDAHULUAN

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998.

Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia. Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi akuntabilitas di

Indonesia. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh banyaknya tuntutan negara-negara pemberi donor dan hibah yang menekan pemerintah Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi agar terwujudnya *good governance*.

Implementasi akuntabilitas di Indonesia pada prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap dalam lingkungan pemerintahan, termasuk dalam lembaga pendidikan. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan penerapan akuntabilitas di setiap instansi pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi.

Karena begitu pentingnya akuntabilitas ini dalam setiap lembaga, termasuk lembaga pendidikan, maka kami akan mencoba membahas permasalahan tersebut dalam artikel ini. Judul pembahasan artikel ini adalah *Analisis Akuntabilitas Lembaga Pendidikan Kontemporer*.

METODE

Metode penelitian ini adalah kajian kepustakaan dengan menggali dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Literatur yang berkaitan itu ada yang berbentuk buku, hasil penelitian yang relevan, jurnal dan referensi lainnya yang mendukung data penelitian ini. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan tersebut dikaji dan dianalisis sehingga menghasilkan hasil kajian yang relevan tentang akuntabilitas lembaga pendidikan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain, untuk menilai apakah mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka, dan untuk menerapkan sanksi jika mereka ini belum memenuhi tanggung jawab (Mashaw, 2006). Sedangkan menurut Trow, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan laporan kepada orang lain, untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana berbagai sumber daya telah digunakan dan apa dampaknya (Trow, 1996).

Pendapat lain menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal (Endahwati, 2014). Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kegiatan pelaporan terhadap suatu program dengan melihat alur kegiatan mulai dari input-proses-

output. Kegiatan ini berfungsi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang (Trihantoyo, 2015).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dipahami, bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggung jawaban tentang suatu amanah atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak-pihak terkait, terutama pihak yang memberikan amanah.

B. Akuntabilitas Lembaga Pendidikan Kontemporer

Penerapan akuntabilitas dalam lembaga pendidikan menjadi sebuah keharusan. Dengan menerapkan akuntabilitas akan meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada lembaga pendidikan. Bentuk penerapan akuntabilitas dalam lembaga pendidikan sebagai berikut :

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. Cara untuk mengetahui keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan program dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program dan kebijakan yang dilakukan.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi. Cara untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi yaitu informasi yang berkaitan dengan program/ kebijakan telah disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap mencakup seluruh program/ kebijakan di lembaga pendidikan.
3. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan. Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan yaitu setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program lembaga pendidikan telah disosialisasikan kepada masyarakat dan telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program dan kebijakan lembaga pendidikan.
4. kelayakan dan konsistensi. Cara untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang dilaksanakan apakah layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam pelaksanaan telah sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang telah disepakati.
5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. Cara untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan yaitu adanya hasil sebuah keputusan kebijakan lembaga pendidikan yang disebar di media masa dan masyarakat dapat mengetahui informasi program lembaga pendidikan (Krina, 2003).

Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan lembaga pemerintahan, termasuk lembaga pendidikan, melalui birokrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ciri-ciri lembaga pendidikan yang akuntabel adalah :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pendidikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.

Lembaga pendidikan harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluruh perencanaan, program dan keunggulan yang dimiliki secara terbuka. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat akan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk mempercayakan anaknya menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut.

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat

Pelayanan adalah unsur utama yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan kepada masyarakat. Memberikan program pendidikan yang maksimal kepada peserta didik, sehingga harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan terpenuhi. Semakin puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi animo dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan tersebut.

3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik

Setiap program yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan harus dijelaskan kepada masyarakat, bisa melalui komite. Program dan kebijakan itu juga harus disampaikan pertanggung jawabannya kepada masyarakat, apalagi jika program itu pendanaannya berkaitan dengan masyarakat/ komite.

4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pengelolaan lembaga pendidikan

Lembaga pendidikan kontemporer harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan melalui komite. Keikutsertaan komite dalam pembangunan pada lembaga pendidikan akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh lembaga pendidikan secara mandiri.

5. Sebagai sarana, bagi publik untuk menilai kinerja lembaga pendidikan (Sawir, 2017).

Akuntabilitas lembaga pendidikan menjadi salah satu sarana bagi masyarakat dalam mengetahui kualitas dan kinerja lembaga pendidikan. Masyarakat sangat

membutuhkan informasi tentang kualitas lembaga pendidikan dalam menentukan pilihan tempat anak-anaknya menempuh pendidikan.

Agar akuntabilitas bisa diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan, setidaknya ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu :

1. Adanya transparansi para penyelenggara pendidikan dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola lembaga pendidikan.
2. Adanya standar kinerja disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan wewenangnya.
3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

C. Model Akuntabilitas Lembaga Pendidikan

Untuk memahami model akuntabilitas, secara khusus Carino memperkenalkan model akuntabilitas administratif yang meliputi tradisional, managerial, program, and process accountability(Sawir, 2017)

Akuntabilitas administratif merupakan suatu akuntabilitas yang memerlukan adanya hubungan hirarki yang jelas diantara pusat-pusat pertanggung jawaban dengan unit-unit dibawahnya. Hubungan hirarki ini biasanya telah ditetapkan dengan jelas baik dalam bentuk aturan organisasi yang disampaikan secara formal ataupun dalam bentuk jaringan hubungan informal. Prioritas pertanggung jawaban lebih diutamakan pada jenjang pimpinan atas dan diikuti terus ke bawah, dan pengawasan dilakukan secara intensif agar semua aparatur yang ada tetap menuruti perintah yang diberikan.

1. Akuntabilitas tradisional adalah suatu tanggung jawab birokrat yang telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi tertentu sebagaimana yang dinyatakan pada tingkatan hirarki tanggung jawab legal. Standar yang digunakan untuk menilai akuntabilitas tradisional adalah legalitas dan peraturan yang dibuat oleh pihak eksternal kepada orang yang bertanggung jawab. Agar diperoleh obyektifitas sesuai dengan peraturan perundangan dan untuk melindungi penggunaan sumber daya publik, masing-masing agensi membuat prosedur setiap transaksi secara adil, tanpa melihat karakteristik kepentingan klien secara individual dalam transaksi dimaksud.
2. Untuk akuntabilitas manajerial, masalah efisiensi penggunaan dana publik, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya merupakan fokus perhatian. Akuntabilitas ini menghendaki pejabat publik harus bertanggung jawab daripada hanya sekedar mematuhi. Selain itu orientasinya pada sisi masukan dan menganjurkan perlunya

perhatian terus menerus untuk menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu dan mendorong penggunaan sumberdaya publik yang tepat. Dengan demikian akuntabilitas manajerial mendorong program dengan memangkas prosedur pemerintah yang berlebih-lebih atau dengan mengganti alternatif kekurangan biaya di dalam prakteknya.

3. Akuntabilitas program adalah menyangkut pencapaian hasil operasi lembaga pendidikan dan melibatkan publik terutama masyarakat lokal. Untuk mencapai efektivitas program sejumlah sarana harus disediakan antara lain berupa pengukuran kinerja secara komprehensif. Dengan demikian akuntabilitas program berkaitan dengan kepemilikan unit-unit dan birokrat yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.
4. Akuntabilitas proses menyangkut informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial dan kesuksesan program lembaga pendidikan atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Model akuntabilitas politik terkait dengan kewajiban menjalankan dan mengalami adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur dan mendistribusikan berbagai sumber serta menjamin adanya kepatuhan pelaksanaan tanggung jawab.

D. Manfaat dan Tujuan Akuntabilitas Lembaga Pendidikan

Akuntabilitas pendidikan tidak hanya berfokus pada masalah fisik dan keuangan, tetapi juga kesesuaian antara tujuan lembaga pendidikan dengan falsafah moral, etika, kebudayaan dan sebagainya (Sukatin & Nasution, 2021).

Tujuan akuntabilitas pendidikan, adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Kepercayaan publik yang tinggi kepada lembaga pendidikan dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat (Setia, 2016).

Rumusan tujuan akuntabilitas tersebut hendak menegaskan bahwa akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaran manajemen lembaga pendidikan, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi dari masyarakat. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen lembaga pendidikan yang berkinerja tinggi.

Penerapan akuntabilitas pada lembaga pendidikan akan sangat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, baik bagi lembaga pendidikan sendiri, bagi masyarakat maupun bagi pemerintah (Trihantoyo, 2015).

1. Bagi sekolah, dokumen akuntabilitas kinerja sekolah merupakan acuan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan rencana pengembangan sekolah. Kegiatan ini sekaligus menjadi bahan masukan untuk usaha pembinaan dan Manajemen Lembaga Pendidikan. Manajemen Lembaga Pendidikan Berbasis Akuntabilitas akan meningkatkan pengembangan kinerja lembaga pendidikan sebagai upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian potret kondisi lembaga pendidikan dapat menjadi tolok ukur untuk persaingan kualitas lembaga pendidikan.
2. Bagi masyarakat, melalui akuntabilitas lembaga pendidikan diharapkan menjadi informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Sehingga secara sadar dan bertanggungjawab masyarakat dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat kaitannya dengan pendidikan bagi anak didik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.
3. Bagi pemerintah, akuntabilitas lembaga pendidikan dapat menjadi acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan/ peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah dapat menggunakan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai bahan evaluasi di masa mendatang dan sebagai alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggung jawaban tentang suatu amanah atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak-pihak terkait, terutama pihak yang memberikan amanah. Penerapan akuntabilitas dalam lembaga pendidikan menjadi sebuah keharusan. Dengan menerapkan akuntabilitas akan meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada lembaga pendidikan. Penerapan akuntabilitas pada lembaga pendidikan akan sangat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, baik bagi lembaga pendidikan sendiri, bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Akuntabilitas yang diterapkan dalam lembaga pendidikan diantaranya adalah model akuntabilitas administratif. Akuntabilitas administratif ini meliputi akuntabilitas tradisional, akuntabilitas manajemen, akuntabilitas program dan akuntabilitas proses.

Saran

Dalam artikel ini baru dikaji konsep akuntabilitas pada lembaga pendidikan kontemporer, ciri-ciri lembaga pendidikan yang sudah menerapkan akuntabilitas, model akuntabilitas yang diterapkan pada lembaga pendidikan. Kesemuanya baru sebatas pada tataran konsep. Untuk itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti dan mengkaji akuntabilitas pada lembaga pendidikan pada tataran praktis atau penerapan pada lembaga pendidikan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4(1), 2014.
- Krina, L. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. In *Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (p. 20).
- Mashaw, J. louis. (2006). Accountability and institutional design: Some thoughts on the grammar of governance. In *Public Accountability: Designs, Dilemmas and Experiences*, edited by Michael W. Dowdle, 115–56. *Cambridge University Press*, 116(5), 115–156.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 9–18.
- Setia, R. (2016). Akuntabilitas Pendidikan Islam. *I'TIBAR: Jurnal Ilmiah Ilmu- Ilmu Keislaman*, 3(6), 71–85.
- Sukatin, & Nasution, F. (2021). Pengukuran Kinerja Dan Akuntabilitas Pendidikan. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2).
- Trihantoyo, S. (2015). Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Akuntabilitas Kinerja. *Widyagogik: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 3(1), 90–102.
- Trow, M. (1996). Trust, markets and accountability in higher education: A comparative perspective. *Higher Education Policy*, 9(4), 309–324.